

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agussabti, Adnan Abdullah. 2014. *Leuser dalam Konsepsi Masyarakat Gayo Lues*. Kemendikbud RI. Jakarta.
- Fajar, Mukti., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Khakim, Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan di Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, PT Citra Aditya Bakri, Bandung.
- M.D. Mahfud, et. al., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta
- HS, Salim. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin. 2017. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. Makassar.
- Indrajati, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenus, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Indrawan M, Richard BP, Jatna S. 2007. *Biologi Konservasi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Kemanusiaan. Edisi ketiga. Terjemahan. IKIP Semarang Press. Lingkungan Hidup di DIY. Dirjen Kebudayaan. Departemen LIPI, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M Hadjon, Philipus, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Yudistira Kusumasumantri, Panji. 2009. *Sejarah 5 Taman Nasional Pertama*. Direktorat Jendral KSDAE. Jakarta.
- Silalahi, Daud, 2016, *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*. Kencana Media. Bandung.
- Soemitro, Ronny Haritijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Yahya, Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika. Jakarta.

#### **B. Jurnal, Artikel, Tugas Akhir, Berita dan Lain-Lain.**

Anggriani, Jum, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan dan Mekanisme Pengawasannya”. *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 3, 28 Juli 2011.

Chairunnisa, Eca. “Peranan Worldwide Fund for Nature (WFF) dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa di Indonesia”. *Global Political Studies Journal*. Vol. 2 No. 1 Hlm. 72-87, 1 April 2018.

Ibrahim, Husaini. “Cagar Budaya di Aceh dan Tanggung Jawab Pemeliharaannya”. *Educational Journal of History and Humanities*. Vol. 1, No. 2, 2018, pp. 16-23

Keumala, Teuku Hendra. *Ramai-ramai Tolak PT. EMM Aceh Trend*. 2018. November 2018.

Nggeboe, Ferdricka. 2018. “Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Batubara”. *Jurnal Lex Specialis*. Vol.1, No. 14. Hal. 3.

Triono, Eddy, “Analisis Yuridis Pengelolaan Ekosistem Leuser di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam”. *Jurnal Doktrin*, Vol. 3, No. 6. Oktober 2015.

Putra, R.H. “Masyarakat Aceh dan Konservasi Kawasan Ekosistem Leuser”. *Prosiding Seminar Nasional Biotik 2015*, ISBN: 978-602-18962-5-9

Sigit Riyanto., Maria S.W. Sumardjono., Eddy O.S. Hiariej., Sulistiowati., Ari Hernawan., Zainal Arifin Mochtar., Totok Dwi Diantoro., Mailinda Eka Yuniza., I Gusti Agung Made Wardana., Nabiyla Risfa Izzati., *Kertas Kebijakan Catatan Kritis UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)*. Edisi 25 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020.

Supriyono, Harry, 2011, “Kajian Yuridis Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan”, *Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta.

Van Beukering, P. J. H., Cesar, H. S. J., & Janssen, M. A. (2003). Economic valuation of the Leuser National Park on Sumatra, Indonesia. *Ecological Economics*, 44(1), 43-62. [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(02\)00224-0](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00224-0)

Wahana Lingkungan Hidup Aceh, “Catatan Akhir Tahun Lingkungan Hidup 2020”. *Catatan Tahun dan Rilis Publik*. Walhi Aceh. Maret 2020.

### C. Website

- Asiamet. 2018. Asiamet Lifts Beutong Copper Gold Project Interest to 80 Percent. <https://asiametresources.com/regulatorynews/2018/06/25/asiamet-lifts-beutong-copper-gold-project-interest-to-80/>, diakses tanggal 10 Juni 2022.
- Diantoro, Totok Dwi, “Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)”. Sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/40670-none-3394d661.pdf> diakses tanggal 10 Juni 2022.
- Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh. 2018. “Izin PT EMM Dinilai Cacat Hukum, GeRAK Bakal Lakukan Upaya Hukum”. <https://www.gerakaceh.id/izin-pt-emm-dinilai-cacat-hukum-gerak-bakal-lakukan-upaya-hukum/>, diakses pada Juni 2022.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh. “Peta Sebaran Potensi Geowisata Provinsi Aceh Tahun 2021”. [https://esdm.acehprov.go.id/media/2021.10/POTENSI\\_ACEH\\_\(2021\).pdf](https://esdm.acehprov.go.id/media/2021.10/POTENSI_ACEH_(2021).pdf), diakses pada Juni 2022.
- Mongabay. 2018. “Tegas! Masyarakat Beutong Tolak Perusahaan Tambang Emas”. <https://www.mongabay.co.id/2018/09/11/tegas-masyarakat-beutong-tolak-perusahaan-tambang-emas/>, diakses tanggal 10 Juni 2022.
- Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Geothermal Badan Geologi Kementerian ESDM, “Indonesian Minerals Yearbook”, <https://geologi.esdm.go.id/assets/media/content/content-indonesian/>, diakses tanggal 10 Juni 2022
- Utomo, Budi, “Dampak Perambahan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat”, Sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/8200-ID-dampak-perambahan-hutan-taman-nasional-gunung-leuser-terhadap-aspek-sosial-ekonomi.pdf>, diakses tanggal 10 Juni 2022
- Wahana Lingkungan Hidup Aceh, 2018. “WALHI Aceh Bersama Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang Sepakat Tolak PT. EMM”. Walhi Aceh. <https://www.walhi.or.id/index.php/walhi-aceh-bersama-masyarakat-beutong-ateuh-Banggalang-sepakat-tolak-pt-emm>, diakses tanggal 10 Juni 2022.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2018. “WALHI Tolak PT EMM”. <https://www.walhi.or.id/walhi-aceh-tolak-pt-em>, diakses tanggal 10 Juni 2022.

## **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187)

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998

*Qanun* Provinsi Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62)

*Qanun* Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Aceh Tahun 2013)

*Qanun* Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28)

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/KPTS-II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10193/Kpts-II/2002  
tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi  
Sumatera Utara

Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/LH/2021

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 91 K/TUN/LH/2020

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor  
192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 241/G/LH/2018/PTUN-JKT